

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI MALUKU UTARA

2022

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI MALUKU UTARA

2022

<https://malut.bps.go.id>

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA 2022

ISSN	: 2460-7517
No Publikasi	: 82000.2307
No. Katalog BPS	: 4102002.82:
Ukuran Buku	17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman	: x + 49 halaman
Naskah	: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
Gambar Kulit	: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
Infografis	: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
Sumber Ilustrasi	: pexels.com
Diterbitkan Oleh	: © Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
Dicetak Oleh	: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN :

Penanggung Jawab Umum :
Aidil Adha, SE, M.E

Penyunting :
Soraya Diana Uli, SST

Penulis :
Nida'ul Hanifah, SST

Pengolah Data :
Nida'ul Hanifah, SST

Desain dan Tata Letak Layout :
Nida'ul Hanifah, SST
Syaifudin Karyadi, S.Si

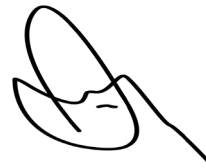
KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas perkenannya Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara 2022” dapat diselesaikan. Publikasi ini merupakan bagian dari upaya BPS Provinsi Maluku Utara dalam rangka melihat secara garis besar tentang masalah kesejahteraan penduduk Provinsi Maluku Utara dengan merepresentasikan ke dalam suatu besaran Indeks Pembangunan Manusia.

Perlu diketahui bahwa publikasi ini menyajikan angka IPM metode baru. Dalam penghitungan IPM metode baru telah dilakukan beberapa perubahan serta penyesuaian IPM baik indikator yang digunakan maupun teknik penghitungannya. Sehingga diharapkan angka IPM metode baru ini lebih valid serta relevan dalam mengukur capaian pembangunan manusia.

Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini. Kritik dan saran guna perbaikan penerbitan publikasi selanjutnya sangat kami harapkan.

Ternate, Maret 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara



Aidil Adha, SE, ME

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA	3
1.1 Konsep Pembangunan Manusia	3
1.2 Pengukuran Pembangunan Manusia	4
1.3 Perubahan Metodologi IPM	5
1.4 Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia	6
1.5 Penghitungan IPM Metode Baru	7
PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA	13
2.1 Sekilas Provinsi Maluku Utara	13
2.2 Status Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara	16
PENDIDIKAN	21
KESEHATAN	27
KEHIDUPAN YANG LAYAK	35
5.1 Perekonomian	37
5.2 Ketenagakerjaan	38
5.3 Kemiskinan	39
KESIMPULAN DAN SARAN	43
6.1 Kesimpulan	43
6.2 Saran	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru	6
Tabel 1.2 Nilai Minimum dan Maksimum	7
Tabel 2.1 Perbandingan Tingkat Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2021	14
Tabel Lampiran 1 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022 (Tahun)	47
Tabel Lampiran 2 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022 (Persen)	47
Tabel Lampiran 3 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022 (Tahun)	48
Tabel Lampiran 4 Pengeluaran Per kapita Riil Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022 (Ribu Rupiah).....	48
Tabel Lampiran 5 Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022	49

DAFTAR GAMBAR

PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA

GAMBAR 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kawasan Sulampua Tahun 2022	15
GAMBAR 2.2 Sepuluh Lapangan Usaha Penyumbang Terbesar PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2022	15
GAMBAR 2.3 Perkembangan IPM Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018 – 2022	16
GAMBAR 2.4 Pertumbuhan IPM Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018 – 2022	16
GAMBAR 2.5 IPM di Kawasan Sulampua Tahun 2022.....	17
GAMBAR 2.6 Indeks Komponen IPM Provinsi Maluku Utara Tahun 2022	17

PENDIDIKAN

GAMBAR 3.1 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Indonesia dan Provinsi Maluku Utara, 2018 – 2022.....	22
GAMBAR 3.2 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Indonesia dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022	22
GAMBAR 3.3. Harapan Lama Sekolah di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022... ..	23
GAMBAR 3.4 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022	23
GAMBAR 3.5 Persentase penduduk 15 tahun ke Atas Provinsi Maluku Utara Menu- rut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2022	24

KESEHATAN

GAMBAR 4.1 Angka Harapan Hidup Indonesia dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	29
GAMBAR 4.2 Angka Harapan Hidup di Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	29
GAMBAR 4.3 Persentase Penolong Proses Persalinan Terakhir dari Perempuan Berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.....	30
GAMBAR 4.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022..	30
GAMBAR 4.5 Banyaknya Tenaga Kesehatan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022	31
GAMBAR 4.6 Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022	31

KEHIDUPAN YANG LAYAK

GAMBAR 5.1 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	35
GAMBAR 5.2 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 (ribu rupiah)	36
GAMBAR 5.3 PDRB Per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 (ribu rupiah)	36
GAMBAR 5.4 PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2022 (triliun rupiah) ..	37
GAMBAR 5.5 PDRB Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 (milliar rupiah)	37
GAMBAR 5.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022	38
GAMBAR 5.7 Distribusi Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.	38
GAMBAR 5.8. Penduduk 15+ Bekerja di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 ...	39
GAMBAR 5.9. Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022	39

Metode Lama

IPM

Metode Baru

Angka melek huruf (AMH)



Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

27 komoditas PPP



96 komoditas PPP

Rata-rata hitung



Rata-rata ukur / geometrik

$$IPM = \frac{1}{3} (I_{Kesehatan} + I_{Pendidikan} + I_{Pengeluaran})$$

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$$

Apa Saja Keunggulan IPM Metode Baru?

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
2. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

"Education is a human right with immense power to transform. On its foundation rest the cornerstones of freedom, democracy and sustainable human development."

-Kofi Annan-

KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan manusia bertitik tolak dari pemahaman bahwa proses pembangunan harus dapat memperluas pilihan. Seorang individu atau suatu keluarga lazimnya mempunyai banyak keinginan, baik yang muluk-muluk maupun yang sangat mendasar. Beberapa yang sangat mendasar adalah berharap keluarganya dapat hidup sehat dan berumur panjang. Tinggal di lingkungan yang sehat, terbebas dari berbagai wabah, serta memperoleh akses pada sanitasi dan air bersih. Individu tersebut menginginkan keluarganya memperoleh pendidikan dan pelatihan yang baik. Mereka berharap mempunyai akses pada sumber daya ekonomi serta dapat memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesehatannya untuk bekerja agar dapat hidup dengan layak. Individu tersebut berharap pula mampu membawakan diri dengan baik dalam pergaulan masyarakat. Mereka juga berharap dapat hidup dalam suasana yang bebas dan mempunyai hak untuk menyuarkan kepentingannya. Proses pembangunan harus dapat merealisasikan harapan-harapan tersebut. Fokus pada manusia inilah yang melandasi konsep pembangunan manusia.

Menurut konsep ini pembangunan harus seimbang, yaitu antara membangun kemampuan dengan memanfaatkan kemampuan. Proses pembangunan setidaknya harus menciptakan lingkungan untuk manusia, baik sebagai individu, keluarga, maupun masyarakat, mengembangkan kemampuannya secara optimal dan mempunyai cukup kesempatan (memanfaatkan kemampuannya) untuk dapat hidup yang produktif dan kreatif sesuai kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, pembangunan manusia tidak hanya peduli dengan pembentukan kemampuan manusia seperti kesehatan yang lebih baik serta pengetahuan dan ketrampilan. Tetapi proses pembangunan manusia juga peduli dengan pemanfaatan kemampuan tersebut, baik untuk bekerja, berlibur, serta kegiatan sosial politik lainnya. Dua sisi pembangunan tersebut harus berkembang secara seimbang. Ketimpangan akan berakibat pemborosan potensi manusia.

Konsep pembangunan seperti diuraikan di atas nampaknya sederhana. Namun sebagai akibat dari penyederhanaan yang berlebihan terhadap tujuan pembangunan, konsep yang cukup komprehensif tersebut menjadi terlupakan. Misalnya dalam paradigma pembangunan ekonomi tujuan pembangunan disederhanakan menjadi pertumbuhan ekonomi/ peningkatan pendapatan per kapita saja.

Seringkali dinyatakan bahwa pendapatan dapat mewakili (*proxy*) dengan baik pilihan-pilihan lainnya. Tetapi sesungguhnya pernyataan tersebut di atas hanya sebagian saja dari kebenaran. Pendapatan memang berguna untuk memperluas pengetahuan dan

keterampilan, menjaga/ meningkatkan kesehatan, namun sebaliknya, pendapatan juga berguna untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pembangunan manusia.

Konsep pembangunan manusia seperti diuraikan tersebut di atas berbeda dari konsep/ paradigma pembangunan yang berkembang selama setengah abad terakhir. Beberapa diantaranya adalah : pembangunan ekonomi, kesejahteraan manusia, kebutuhan dasar manusia, dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam paradigma pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memang penting. Tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjamin pembangunan manusia. Pendekatan kesejahteraan manusia melihat manusia hanya sebagai pihak yang berhak memperoleh manfaat pembangunan, bukan sebagai peserta aktif pembangunan.

Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan diri pada sejumlah barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat yang kurang beruntung, dan bukannya pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat. Konsep pembangunan sumber daya manusia berfokus pada meningkatkan kemampuan atau memberdayakan manusia, bukan pemanfaatan kemampuan tersebut. Sementara itu pendekatan pembangunan manusia mencakup keseluruhan aspek tersebut di atas. Dengan demikian konsep ini mampu mencakup lebih baik berbagai segi dan kompleksitas kehidupan manusia.

1.2 Pengukuran Pembangunan Manusia

Seperti halnya dengan pendekatan pembangunan ekonomi, konsep pembangunan manusia ini juga terukur. Berdasarkan perspektif pembangunan seperti telah diuraikan di atas, pembangunan manusia tidak diukur dari pendapatan semata, tetapi dari indeks komposit yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. Pada tahap awal penyusunan indeks, pilihan diberikan pada tiga unsur penting/pilar utama/ dimensi kehidupan manusia: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*decent standart of living*).

Apa saja Manfaat IPM?

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro.
3. IPM digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum

(DAU).

4. Komponen IPM (HLS, RLS, dan Pengeluaran) merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID).

1.3 Perubahan Metodologi IPM

Sejak *launching* IPM tahun 1990 telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan penghitungan IPM. Hingga pada tahun 2010, UNDP memperbaharui metodologi penghitungan IPM yang kemudian dilakukan penyempurnaan kembali pada tahun 2011. Perubahan metodologi penghitungan IPM ini diikuti oleh beberapa negara diantaranya India di tahun 2011, Filipina tahun 2012 serta China di tahun 2013.

Mengapa metodologi IPM diubah?

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
2. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Apa Saja Yang Berubah?

1. Indikator

- Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.
- Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

2. Metode Penghitungan

- Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Apa Saja Keunggulan IPM Metode Baru?

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
 - Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah,

bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

- PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

1.4 Implementasi IPM Metode baru di Indonesia

Indonesia mengaplikasikan metode baru penghitungan IPM tersebut pada tahun 2015 dengan memperhatikan beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Untuk dimensi kesehatan, telah tersedianya data Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir (e_0) hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP2010).
2. Pada dimensi pengetahuan, perubahan indikator perlu dilakukan dengan adanya perubahan penimbang (*weight*) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang merupakan sumber data penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Cakupan pengukuran rata-rata lama sekolah juga mengalami perubahan yang sebelumnya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi penduduk usia 25 tahun ke atas. Perubahan tersebut mempertimbangkan kondisi masih banyaknya masyarakat yang melakukan pendidikan pada rentang usia 15-25 tahun.
3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Susenas.
4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Tabel 1.1 Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran})$		Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum

Dalam menghitung IPM, setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum. Penentuan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah. Berikut tabel yang menyajikan nilai tersebut.

Tabel 1.2 Nilai Minimum dan Maksimum

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Umur Harapan Hidup	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP \$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP \$)	26.572.352** (Rp)

Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

1.5 Penghitungan IPM Metode Baru

IPM merupakan indeks komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan serta dimensi pengeluaran (standar hidup layak).

Penghitungan Komponen IPM

1. Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan diukur menggunakan umur harapan hidup saat lahir (UHH). UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

UHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010. Dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)* atau *Mortpack*.

Indeks kesehatan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\text{min}}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\text{min}}}$$

2. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator, yakni angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling – MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling – EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Penghitungan HLS menggunakan asumsi bahwa kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

Indeks pengetahuan dihitung rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{\text{HLS}} - I_{\text{RLS}}}{2}$$
$$I_{\text{HLS}} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}_{\text{min}}}{\text{HLS}_{\text{maks}} - \text{HLS}_{\text{min}}}$$
$$I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{\text{maks}} - \text{RLS}_{\text{min}}}$$

3. Dimensi Pengeluaran (Standar Hidup Layak)

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung PPP.

Sedangkan pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan PPP, dengan pertimbangan: Kontribusi 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen pada tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012.

Indeks pengeluaran (standar hitung layak) dihitung dengan rumus berikut:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{\max} - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}$$

Penghitungan IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Bagaimana mengukur kecepatan IPM?

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Dimana:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Bagaimana klasifikasi Pembangunan Manusia?

Untuk mengklasifikasikan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah diperlukan sebuah ukuran yang mampu membedakan tingkat capaian pembangunan manusia antar wilayah. Pengklasifikasian pembangunan manusia ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$)
- Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- Rendah ($IPM < 60$)

IPM 2022 Regional Sulampua

1. Sulawesi Utara

73,81

2. Sulawesi Selatan

72,82

3. Sulawesi Tenggara

72,23

4. Sulawesi Tengah

70,28

5. Maluku

70,22

6. Gorontalo

69,81

7. Maluku Utara

69,47

8. Sulawesi Barat

66,92

9. Papua Barat

65,89

10. Papua

61,39

IPM

Maluku Utara Tahun 2022

69,47

naik **0,71** poin
dibanding
IPM 2021



Komponen Pembentuk



Umur Harapan
Hidup saat Lahir (UHH)

68,79 Tahun



Rata-rata Lama
Sekolah (RLS)

9,24 Tahun



Harapan Lama
Sekolah (HLS)

13,73 Tahun



Pengeluaran per
Kapita

8,4 Jt Rupiah

"All that is valuable in human society depends upon the opportunity for
development accorded the individual."

-Albert Einstein-

Bab ini membahas status pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara dan menyajikan secara ringkas capaian-capaian pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, serta standar hidup yang layak. Indikator capaian pembangunan manusia, sebagaimana diukur menggunakan IPM, akan dibahas dalam konteks komparatif secara wilayah (regional) dengan harapan dapat memberikan perbandingan capaian pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara dengan provinsi lainnya di Indonesia.

2.1 Sekilas Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia Timur setelah mekar dari Provinsi Maluku pada tahun 1999. Provinsi yang biasa disingkat sebagai “Malut” ini merupakan provinsi kepulauan, terdiri dari pulau-pulau dengan yang terbesar adalah Pulau Halmahera. Letaknya berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan diapit oleh dua pulau besar, yaitu Papua dan Sulawesi, dan terletak antara 3° LU dan 3° LS dan antara 124° dan 129° BT.

Luas wilayah Maluku Utara, adalah berupa daratan seluas 31.982,50 km². Wilayah Maluku Utara memiliki perbedaan waktu 2 jam lebih cepat dari Jakarta karena berada pada wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT). Maluku Utara memiliki 5 gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Dukono di Halmahera Utara, Ibu dan Gamkonora di Halmahera Barat, Gamalama di Ternate dan Makian di Halmahera Selatan. Gunung Sibela merupakan gunung tertinggi di Maluku Utara, dengan ketinggian 2.110 m di atas permukaan laut yang terletak di Halmahera Selatan. Terdapat sekitar 12 danau di wilayah Maluku Utara, salah satu yang terkenal adalah Danau Tolire yang terletak di Ternate dengan kedalaman sekitar 50 m. Sebanyak 50 sungai mengalir wilayah Maluku Utara.

Keadaan iklim di Provinsi Maluku Utara cukup baik untuk pengembangan sektor pertanian khususnya tanaman perkebunan tahunan. Salah satu komoditas perkebunan yang menjadi produk unggulan di Maluku Utara adalah kelapa. Produk kelapa banyak diolah kembali menjadi kopra yang kemudian akan diekspor ke provinsi lain. Luas area yang digunakan untuk menanam komoditas kelapa pada tahun 2022 tercatat sebanyak 204.009 hektar dengan produksi kelapa pada tahun 2022 sebesar 209.528,43 ton .

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencakup 8 kabupaten dan 2 kota, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai, Pulau Taliabu serta Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Di Provinsi Maluku Utara terdapat 118 Kecamatan dan 1.199 Desa/Kelurahan. Halmahera Selatan merupakan kabupaten yang memiliki kecamatan dan desa/kelurahan terbanyak (30 kecamatan dan 256 desa/kelurahan), Pulau Morotai memiliki kecamatan paling sedikit (6 kecamatan), sedangkan Halmahera Tengah memiliki jumlah desa/kelurahan paling sedikit (64 desa/kelurahan)

Pemerintahan Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Gubernur KH. Abdul Ghani Kasuba, Lc dengan Wakil Gubernur Al Yasin Ali. Komposisi keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Golkar masing-masing sebanyak 8 orang. Kemudian Partai Gerindra sebanyak 5 orang, selanjutnya Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Nasional Demokrat masing-masing sebanyak 4 orang. Sementara itu Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, Perindo dan partai lainnya memiliki anggota antara 1 sampai 2 orang.

Provinsi Maluku Utara memiliki jumlah penduduk sebesar 1.319.338 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 41 jiwa/km² pada tahun 2022 dan laju pertumbuhan penduduk 1,61 persen pada tahun 2022. Kota Ternate memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni 1.856 jiwa/km² sedangkan Halmahera Timur memiliki kepadatan penduduk terendah yakni sebesar 14 jiwa/km².

Dari sisi pendidikan, rata-rata penduduk Maluku Utara bersekolah hingga lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Maluku Utara sebesar 9,24 tahun. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata program Wajib Belajar 9 tahun sudah tercapai di provinsi ini.

Tabel 2.1
Perbandingan Tingkat Pembangunan Manusia
Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2022

Komponen	Maluku Utara	Indonesia
(1)	(2)	(3)
Harapan Hidup (tahun)	68,79	71,85
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,73	13,10
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,24	8,69
Pengeluaran Riil Perkapita (Rp. 000)	8398	11479
IPM	69,47	72,91

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

dibandingkan dengan capaian Indonesia secara umum, nilai rata-rata lama sekolah penduduk Maluku Utara berada di atas capaian nasional yang hanya tercatat sebesar 8,69 tahun.

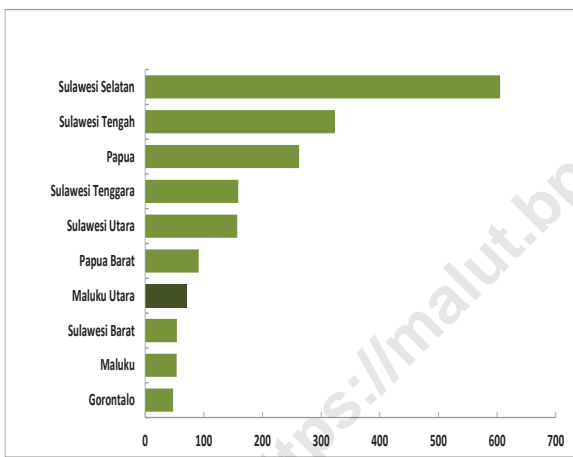
Bila dilihat dari penduduk 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki, pada tahun 2022,

jumlah penduduk Maluku Utara yang tidak punya ijazah mencapai 11,64 persen, yang memiliki ijazah SD 22,01 persen, SMP 23,49 persen, SMA/SMK 30,47 persen, sedangkan perguruan tinggi hanya 12,39 persen.

Nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Maluku Utara tahun 2022 tercatat sebesar 13,73 tahun, hal ini berarti bahwa penduduk Maluku Utara usia 7 tahun ke atas berpeluang bersekolah hingga lulus SMA.

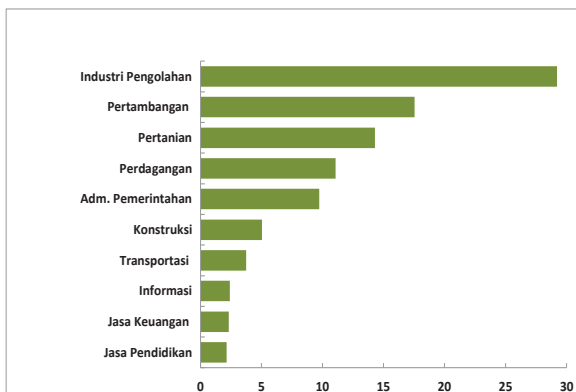
Di bidang ekonomi, nilai tambah yang tercipta dari aktivitas ekonomi di

GAMBAR 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kawasan Sulampua Tahun 2022 (Triliun Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 2.2
Sepuluh Lapangan Usaha Penyumbang Terbesar PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara tahun 2022 atau tercermin dari PDRB atas dasar harga yang berlaku sebesar 70,90 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) maka PDRB Provinsi Maluku Utara relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya, menduduki peringkat ke tujuh se-Sulampua. Provinsi Maluku Utara perlu mengoptimalkan potensi yang ada baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kapasitas perekonomiannya.

Struktur perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 didominasi oleh sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan menyumbang lebih dari seperempat perekonomian Maluku Utara tahun 2022, yaitu sebesar 29,21 persen. Kategori terbesar kedua setelah industri pengolahan yaitu pertambangan (17,55 persen) dan pada urutan ke tiga adalah pertanian (14,25 persen).

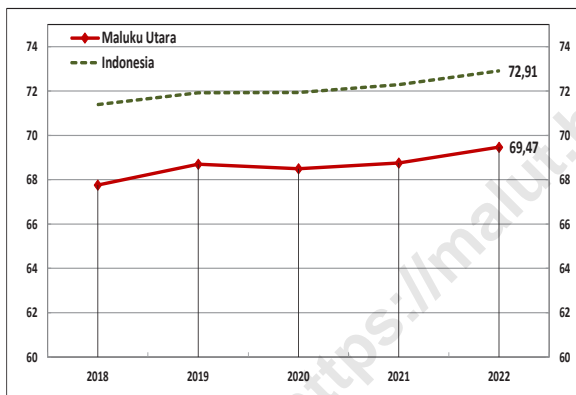
Perekonomian Maluku Utara

tahun 2022 tumbuh sebesar 22,94 persen, mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai (16,79 persen). Percepatan ini diantaranya disebabkan oleh percepatan pertumbuhan Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Pengadaan Listrik dan Gas.

2.2 Status Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara

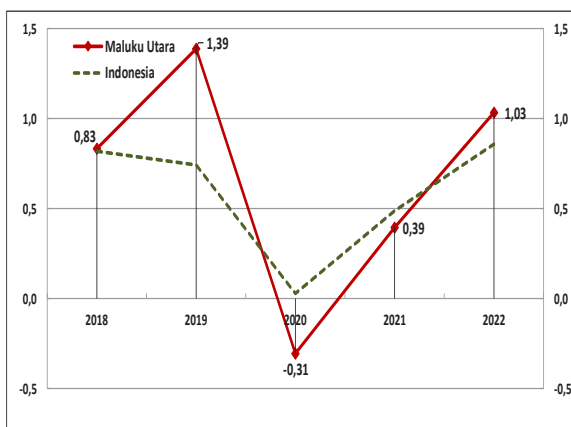
Status pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. IPM Provinsi Maluku Utara tahun 2018 sebesar 67,76 kemudian meningkat menjadi 68,70 pada tahun 2019, namun

GAMBAR 2.3
Perkembangan IPM Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 2.4
Pertumbuhan IPM Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018-2022



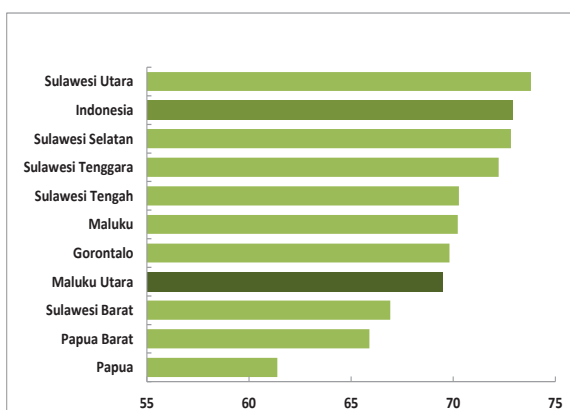
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 68,49 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 menjadi 69,47 atau bertambah 0,71 poin di bandingkan tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah dalam hal pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara.

Capaian pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara ini tergolong IPM sedang. Bila dibandingkan dengan IPM Nasional, perkembangan IPM Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 masih berada di bawah IPM Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara perlu ditingkatkan agar mencapai rata-rata provinsi di Indonesia.

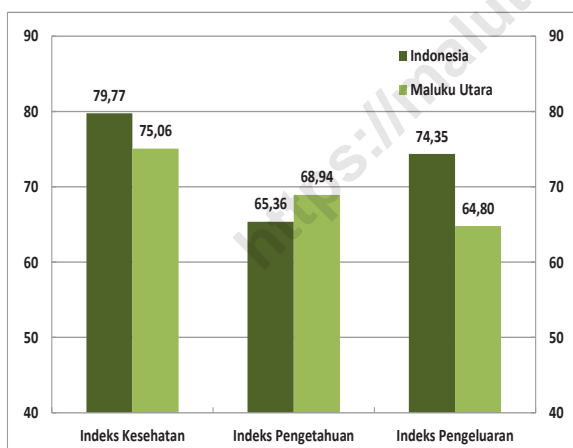
Dilihat dari laju pertumbuhan IPM selama tahun 2018-2022, pertumbuhan IPM Provinsi Maluku Utara terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai -0,31 persen, ini merupakan pertama kali dalam periode lima

GAMBAR 2.5
IPM di Kawasan Sulampua Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 2.6
Indeks Komponen IPM Provinsi Maluku Utara Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

tahun terakhir pertumbuhan IPM Provinsi Maluku Utara mengalami nilai negatif. Namun, seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi, IPM Maluku Utara di tahun 2022 tumbuh 1,03 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan IPM Nasional sebesar 0,86 persen.

IPM Provinsi Maluku Utara tahun 2022 berada pada posisi ke-28 se-Indonesia. Secara regional, capaian IPM Provinsi se-Sulampua yang tergolong tinggi adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Lima provinsi lainnya tergolong sedang. Sehingga, IPM Provinsi Maluku Utara berada peringkat ke-7 di atas Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua.

Dilihat dari komponen pembentuk IPM Provinsi Maluku Utara, terlihat bahwa peningkatan nilai indeks pada tahun 2022 terjadi pada seluruh komponen. Nilai komponen yang tertinggi adalah Indeks Kesehatan dengan nilai indeks sebesar 75,06. Indeks Pengetahuan berada pada posisi kedua dengan nilai indeks 68,94

dan Indeks Pengeluaran berada pada posisi terakhir dengan nilai indeks sebesar 64,80. Nilai indeks ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia di bidang kesehatan relatif lebih baik dibandingkan bidang pendidikan dan ekonomi.

Melihat capaian pembangunan manusia di tahun 2022 antara Provinsi Maluku Utara dengan Indonesia sebagai rata-rata provinsi terlihat bahwa capaian pembangunan manusia Provinsi Maluku Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia.

Capaian yang lebih rendah ini terjadi pada dua komponen pembentuk IPM, yaitu Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran sedangkan capaian Indeks Pendidikan Provinsi Maluku Utara lebih baik dibandingkan Indonesia. Rendahnya indeks pengeluaran menunjukkan masih rendahnya capaian pembangunan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan manusia yang berkualitas menuntut keseimbangan dalam pembangunan baik kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.

<https://malut.bps.go.id>

Harapan Lama Sekolah (HLS)

13,73 Tahun | Naik **0,05** tahun dibanding HLS 2021

3 Kabupaten/Kota dengan HLS tertinggi

1. Ternate
15,76 Tahun

2. Tidore Kepulauan
14,36 Tahun

3. Halmahera Utara
13,67 Tahun



RLS terendah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

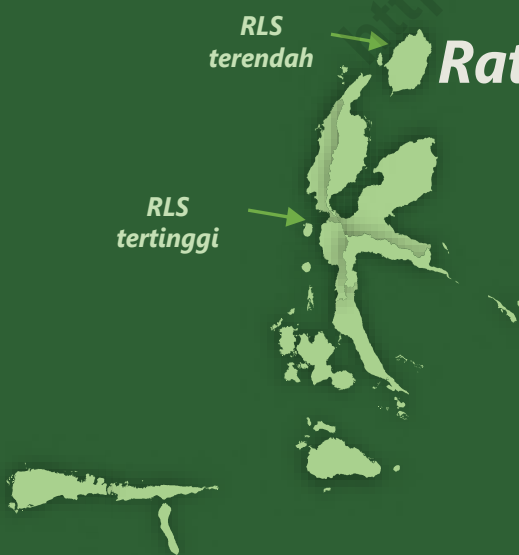
Naik **0,15** tahun dibanding RLS 2021 | **9,24** Tahun

3 Kabupaten/Kota dengan RLS tertinggi

1. Ternate
12,06 Tahun

2. Tidore Kepulauan
9,96 Tahun

3. Halmahera Tengah & Kepulauan Sula
9,02 Tahun



"The falsification of history has done more to impede human development than any one thing known to mankind."

-Jean-Jacques Rousseau-

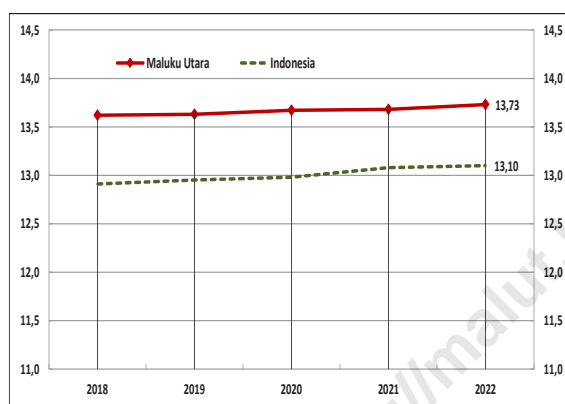
Pendidikan merupakan komponen penting dalam pembangunan manusia. Indikator-indikator sederhana yang meliputi tingkat pendidikan rata-rata penduduk dan harapan lama sekolah merupakan determinan penting IPM. Meski sekilas nampak sederhana, capaian indikator sederhana tersebut berimplikasi dalam hal kesiapan dan kapasitas manusia untuk berperan tidak hanya menjadi obyek pembangunan tetapi juga sekaligus menjadi subyek dan *ultimate beneficiary* pembangunan itu sendiri.

Berbagai permasalahan yang melingkupi pendidikan di Provinsi Maluku Utara saat ini adalah perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan. Desakan untuk menjawab tantangan permasalahan ini menjadi makin dirasakan setelah Indonesia mengikatkan diri melalui komitmen untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's), yaitu pendidikan berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan.

Pada bab ini akan dibahas status pembangunan pendidikan di Provinsi Maluku Utara berdasarkan data, indikator, dan analisisnya, khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap capaian pembangunan manusia sebagaimana diukur dengan IPM. Namun, analisis akan disajikan lebih dari sekedar menjelaskan perannya dalam mempengaruhi IPM, tetapi dalam konteks pembangunan secara umum. Indikator yang digunakan merupakan alat ukur yang menunjukkan status pembangunan pendidikan, yaitu angka partisipasi sekolah rata-rata lama bersekolah, harapan lama sekolah, dan lainnya sampai dengan sarana dan tenaga pendidikan. Telaah yang lebih luas ini diharapkan dapat memberi manfaat lebih jauh, khususnya dalam kaitan kepentingan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan sumber daya manusia pada umumnya.

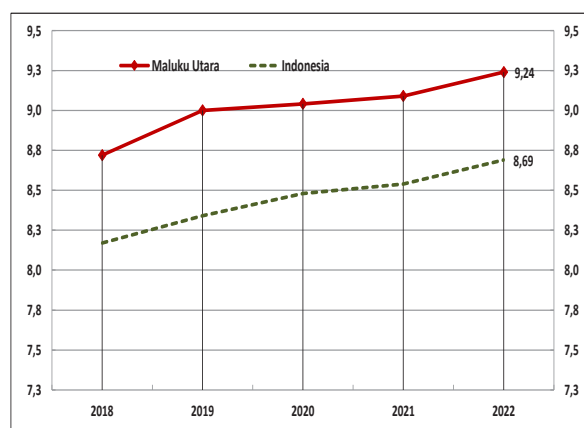
Taraf pendidikan penduduk diukur dengan berbagai pendekatan. Cara yang cukup sederhana adalah dengan mengukur harapan lama sekolah dan rata-rata lama tahun bersekolah penduduk. Cara yang lebih rinci adalah dengan melakukan disagregasi dan pengelompokan penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang diselesaikannya. Harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) memberikan gambaran lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka rata-rata lama tahun bersekolah (*mean years of schooling*)

GAMBAR 3.1
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Indonesia dan Provinsi Maluku Utara, 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 3.2
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Indonesia dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

memberikan gambaran umum secara agregat tingkat pendidikan yang diselesaikan dan tingkat keterampilan penduduk secara umum.

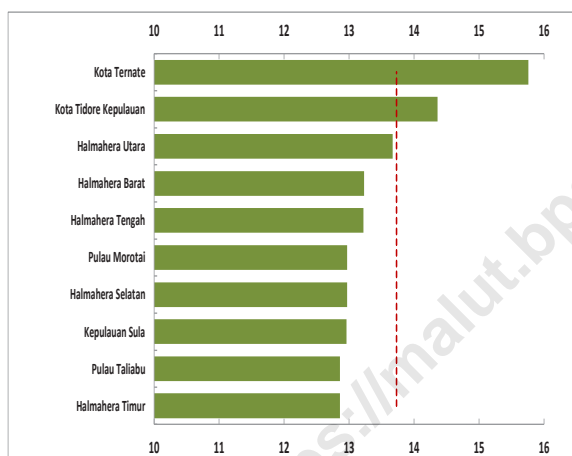
Perkembangan indikator pendidikan di Provinsi Maluku Utara sejak mekar dari Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan. Indikator Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,62 tahun pada tahun 2018 menjadi 13,73 tahun pada tahun 2022. Capaian indikator harapan lama sekolah sudah lebih baik dibandingkan Indonesia sebagai rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk Maluku Utara usia 7 tahun ke atas berpeluang untuk bersekolah lebih lama dibandingkan dengan rata-rata provinsi yaitu sampai lulus SMA.

Kondisi yang baik ini juga dapat terlihat pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas. Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Maluku Utara tahun 2022 sebesar 9,24 tahun artinya rata-rata penduduk Maluku Utara

bersekolah hingga lulus SMP.

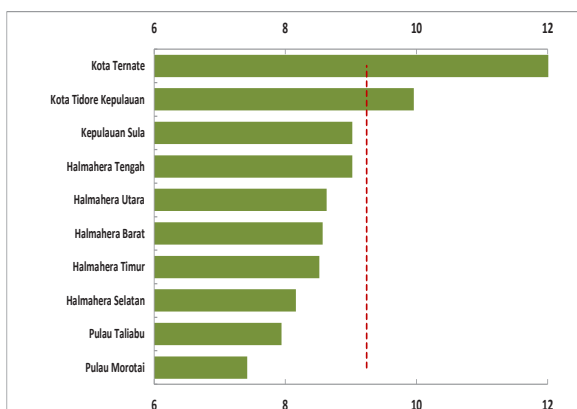
Angka ini menunjukkan sudah tercapainya program Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun di Provinsi Maluku Utara. Peningkatan tingkat pendidikan penduduk ini sudah selayaknya perlu ditingkatkan dengan menambahkan program-program pendidikan seperti beasiswa pendidikan dan bantuan untuk siswa dengan keluarga tidak mampu agar bisa terus bersekolah sampai dengan jenjang pendidikan yang tinggi.

GAMBAR 3.3
Harapan Lama Sekolah di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 3.4
Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Maluku Utara Tahun
2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

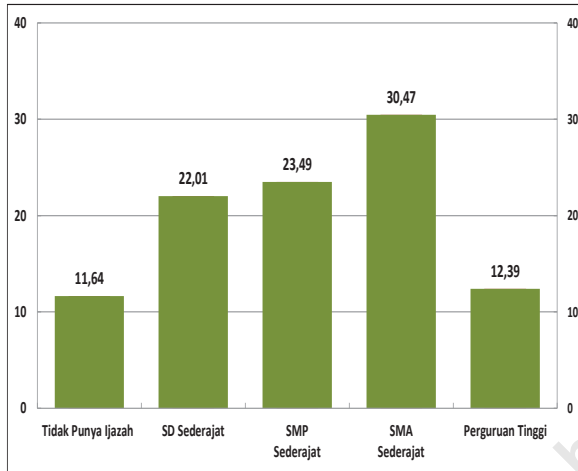
Melihat perbandingan indikator pendidikan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dapat diketahui bahwa secara umum, bahwa Kota Ternate memiliki kualitas pembangunan di bidang pendidikan paling baik se-Provinsi Maluku Utara.

Angka harapan lama sekolah tertinggi di Kota Ternate (15,76 tahun) dan Kota Tidore Kepulauan (14,36 tahun), sedangkan harapan lama sekolah terendah di Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Halmahera Timur (12,86 tahun).

Rata-rata lama sekolah yang mencerminkan rata-rata tingkat pendidikan yang dicapai penduduk di suatu wilayah pada tahun 2022 tertinggi berada di Kota Ternate dengan nilai 12,06 tahun dan Kota Tidore Kepulauan dengan nilai 9,96 tahun.

Sedangkan posisi terendah adalah Kabupaten Pulau Morotai dengan nilai 7,42 tahun yang mencerminkan bahwa secara rata-rata penduduk di Kabupaten Pulau Morotai berhasil menamatkan jenjang pendidikan hingga kelas 1 SMP.

GAMBAR 3.5
Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Provinsi Maluku Utara Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

memiliki ijazah sekolah dasar (tidak/belum bersekolah) yang mencapai 11,64 persen, sementara mereka yang berpendidikan SD sederajat sebesar 22,01 persen, SMP sederajat sebesar 23,49 persen, SMA sederajat sebesar 30,47 persen, dan perguruan tinggi hanya sebesar 12,39 persen saja. Dari data ini menunjukkan bahwa di Provinsi Maluku Utara masih kekurangan SDM yang berkualitas dengan pendidikan tinggi di dalam angkatan kerjanya. Melihat pada kondisi SDM saat ini, apabila Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali fokus dan mengunggulkan sektor pertanian dalam tema pembangunan daerahnya dirasa tepat karena di sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dari segala jenjang pendidikan. Namun demikian, untuk lebih mendukung perkembangan sektor pertanian ke arah yang lebih maju dan modern, pelatihan dan penyuluhan akan sangat diperlukan sejalan dengan meningkatnya tantangan yang muncul seiring kemajuan sektor pertanian, seperti modernisasi pertanian dan agrobisnis.

Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pulau Morotai belum mencapai rata-rata RLS kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara. jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara dalam hal jenjang pendidikan yang diselesaikan oleh penduduknya. Hal ini juga menunjukkan adanya ketidakmerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari sisi

Pengelompokan penduduk menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Maluku Utara belum begitu menggembirakan, terlihat dari persentase penduduk yang tidak



Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)

68,79

Tahun | Naik **0,34 tahun**
dibanding UHH 2021

**3 Kabupaten /
Kota dengan
UHH
tertinggi**

Kab Halmahera Utara

69,88

Kota Ternate

71,38

Kota Tidore Kepulauan

69,43

"There is one lesson from the past, in particular, that we cannot afford to ignore: You cannot make progress on gender equality or broader human development, without safeguarding women's reproductive health and rights."

-Hillary Clinton-

Kesehatan merupakan faktor penting pembangunan manusia dan menjadi dasar bagi pembangunan bidang lainnya. Manusia yang sehat merupakan prasyarat untuk mewujudkan *people centered development*. Mengingat peran sangat penting kesehatan dalam pembangunan manusia serta dalam upaya mewujudkan *people centered development*, maka investasi sumber daya manusia melalui kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan siklus hidup (*lifecycle approach*), yang dimulai sejak sebelum bayi itu lahir sampai dengan tumbuh menjadi calon generasi yang sehat.

Status kesehatan memberikan suatu kemampuan kepada seseorang untuk menjadi lebih produktif, dan dengan demikian mempunyai daya saing dalam pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak. Kesehatan yang rendah tidak akan memberikan sumbangan terhadap produktivitas dan daya saing sebagai pekerja. Jika peningkatan kualitas penduduk diabaikan, besar kemungkinan penduduk yang produktif menjadi tidak produktif, bahkan menjadi beban. Bahkan beban ini semakin besar, jika yang benar-benar produktif hanya sebagian kecil dari kelompok usia produktif. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, maka akan berdampak pada kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi tujuan pembangunan milenium yang dicanangkan oleh PBB. Pada aspek pembangunan kesehatan target yang dituju sangat spesifik dan terukur, yaitu mengurangi Angka Kematian Anak (mengurangi hingga dua-per-tiga tingkat kematian anak dibawah usia 5 tahun), meningkatkan kesehatan ibu (menurunkan 3/4-nya Angka Kematian Ibu di Indonesia), serta mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar. Target pembangunan kesehatan yang menjadi tujuan pembangunan milenium pun berlanjut menjadi salah satu tujuan dari 17 tujuan global *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu tujuan ke-3, kehidupan sehat dan sejahtera (menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia).

Dalam konteks Provinsi Maluku Utara, kompleksitas permasalahan kesehatan yang dihadapi hampir sama dengan yang dihadapi penduduk provinsi lainnya. Umur harapan hidup di Provinsi Maluku Utara masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka Indonesia sebagai rata-rata. Penolong proses kelahiran bukan oleh tenaga kesehatan masih cukup tinggi. Penduduk yang memiliki keluhan kesehatan masih relatif tinggi. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan sebagai akibat dari keterbatasan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia tenaga kesehatan baik dalam

kuantitas maupun kualitas terutama untuk dokter, bidan desa dan perawat.

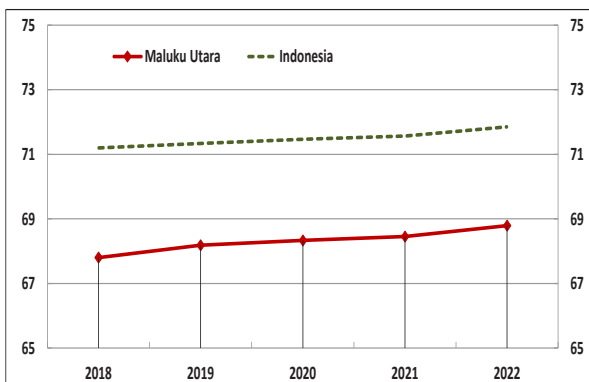
Selain itu akses terhadap pelayanan kesehatan (modern) juga masih tergolong rendah, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, dan atau yang tinggal di daerah tertinggal/terpencil/sulit dijangkau. Akses yang mereka perlukan tidak hanya dari segi keterjangkauan ke lokasi fasilitas kesehatan, tetapi juga dari segi dana dan pelayanan. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan menyangkut budaya/perilaku untuk hidup sehat, pemeliharaan kesehatan lingkungan juga masih kurang. Penanganan masalah kesehatan tidak dapat dilakukan secara sekaligus, terkait dengan segala keterbatasan yang ada baik menyangkut pendanaan dan sumberdaya yang tersedia. Dengan kondisi seperti itu, maka prioritas program dan kegiatan perlu dilakukan. Penanganan masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan bukan semata membangun fasilitas kesehatan, namun perlu diiringi dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan. Kualitas kesehatan yang baik tidak hanya ditunjang oleh ketersediaan pendanaan yang memadai, namun juga oleh ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas. Tidak sedikit fasilitas kesehatan dibangun, tapi tidak tersedia pelayanan kesehatan karena tidak ada tenaga kesehatan. Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari pengelolaan pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, dalam hal pemberian pelayanan di rumah sakit umum, perlu dikelola dengan baik sehingga tidak perlu memakan waktu menunggu yang terlalu lama.

Mengingat kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas manusia, merupakan suatu keharusan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih terus melingkupinya. Bab ini membahas aspek kesehatan terkait dengan permasalahan dan isu strategis di Provinsi Maluku Utara, khususnya dalam konteks kontribusi kesehatan terhadap capaian pembangunan manusia. Meskipun IPM untuk kesehatan hanya diukur dari Umur Harapan Hidup, karena indikator kesehatan lain lebih sulit untuk diperoleh datanya, namun indikator status kesehatan lainnya perlu dibahas dalam rangka meningkatkan Umur Harapan Hidup. Indikator yang akan dibahas berdasarkan data yang tersedia antara lain morbiditas, penolong proses kelahiran, fasilitas sanitasi, sampai dengan fasilitas dan tenaga kesehatan.

Status kesehatan penduduk diukur dengan berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung. Umumnya indikator untuk mencerminkan status kesehatan diperoleh secara tidak langsung menggunakan estimasi tertentu, mengingat data kematian sulit diperoleh. Indikator yang sering digunakan untuk mencerminkan status kesehatan adalah mortalitas, status gizi dan morbiditas. Sampai saat ini data untuk mengukur status kesehatan tersebut sulit diperoleh, karena sifat kejadian insidental dan tersebar di masyarakat, sistem registrasi belum berjalan dengan baik, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan setiap kejadian tersebut juga masih rendah.

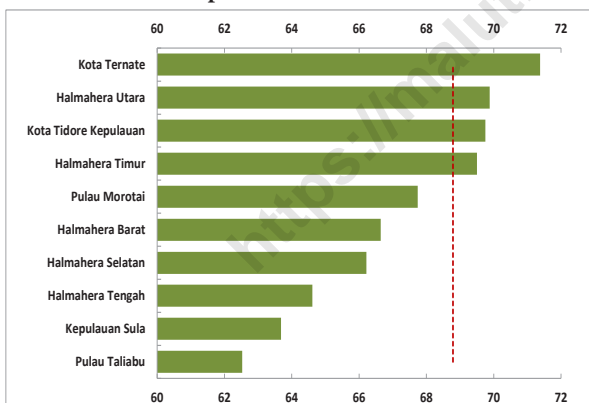
Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mencerminkan status kesehatan

GAMBAR 4.1
Umur Harapan Hidup Indonesia dan Provinsi Maluku Utara
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 4.2
Umur Harapan Hidup di Maluku Utara menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Utara. Nilai indikator Umur Harapan Hidup tertinggi berada di Kota Ternate dengan nilai 71,38 tahun sedangkan terendah di Kabupaten Pulau Taliabu dengan nilai 62,53 tahun. Nilai ini menunjukkan bahwa status kesehatan penduduk di Kota Ternate lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Status Kota Ternate sebagai daerah perkotaan dan fasilitas serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, memberikan derajat kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara.

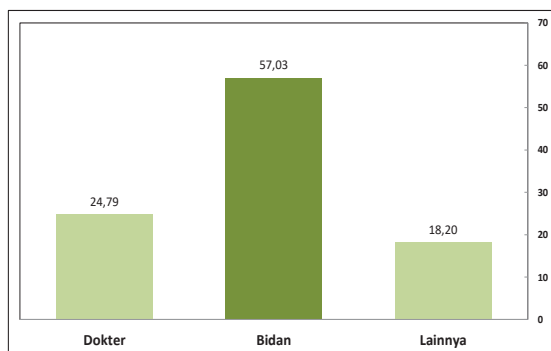
Indikator Umur Harapan Hidup berhubungan erat dengan indikator Angka Kematian Bayi. Tinggi rendahnya nilai indikator Angka Kematian Bayi dipengaruhi oleh indikator lainnya, yaitu status kesehatan reproduksi yang meliputi persalinan oleh

dalam pencapaian IPM adalah Umur Harapan Hidup. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Umur Harapan Hidup tinggi akan dicapai jika penduduk mempunyai derajat kesehatan yang baik.

Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Maluku Utara, dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Umur Harapan Hidup tahun 2018 sebesar 67,80 tahun dan meningkat menjadi 68,79 tahun pada tahun 2022. Peningkatan indikator ini menunjukkan bahwa setiap tahun derajat kesehatan penduduk Provinsi Maluku Utara meningkat. Namun demikian, bila dibandingkan dengan angka UHH Nasional, UHH Maluku Utara masih di bawah UHH Nasional yang mencapai 71,85 tahun di tahun 2022.

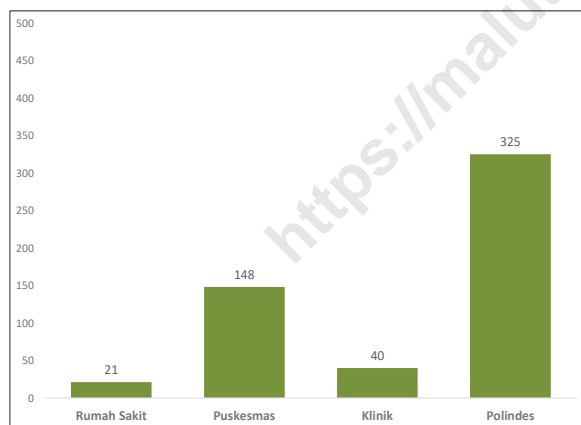
Selain perkembangan indikator Umur Harapan Hidup, juga perlu dilihat capaian di tingkat kabupaten/kota di Maluku

GAMBAR 4.3
Persentase Penolong Proses Persalinan Terakhir dari
Perempuan Berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin di
Provinsi Maluku Utara Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 4.4
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Maluku Utara, pada tahun 2022 sudah terdapat 21 rumah sakit, 148 puskesmas, 40 klinik kesehatan, dan 325 pondok bersalin desa (polindes). Dengan jumlah ini maka pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku Utara dapat berjalan dengan baik, selain perlunya ditambah alat kesehatan yang modern dan memadai.

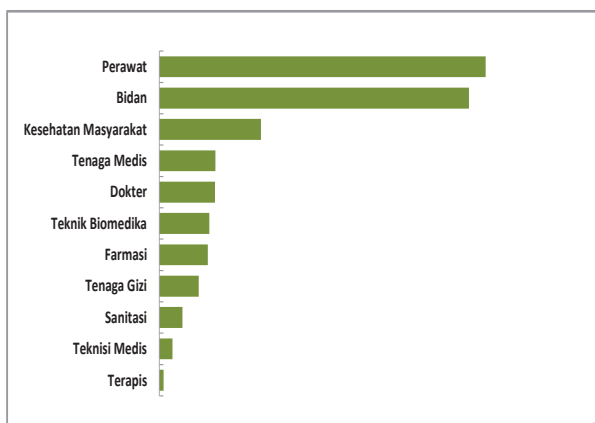
Sedangkan dilihat dari jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022, tersedia sebanyak 150 orang dokter spesialis, 450 orang dokter umum dan 85 orang dokter gigi. Sedangkan jumlah bidan terdapat sebanyak 3.810 orang. Jumlah tenaga kesehatan seperti perawat sebanyak 4.016 orang, farmasi 596 orang, tenaga gizi 486 orang, kesehatan masyarakat 1.251 orang, dan tenaga medis lainnya 1.809

tenaga kesehatan. Berdasarkan data SUSENAS tahun 2022, di Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa penolong persalinan terbesar adalah oleh bidan yang mencapai 57,03 persen. Persentase persalinan yang ditolong oleh lainnya (meliputi dukun beranak dan lainnya) sebesar 18,20 persen menunjukkan bahwa masyarakat telah percaya kepada tenaga kesehatan dalam menolong persalinannya dikarenakan kualitasnya yang sudah baik.

Status kesehatan penduduk Provinsi Maluku Utara, dapat tercermin dari persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Pada tahun 2022 persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 16,41 persen, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 15,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan sedikit meningkat sebesar 0,75 persen dari tahun sebelumnya.

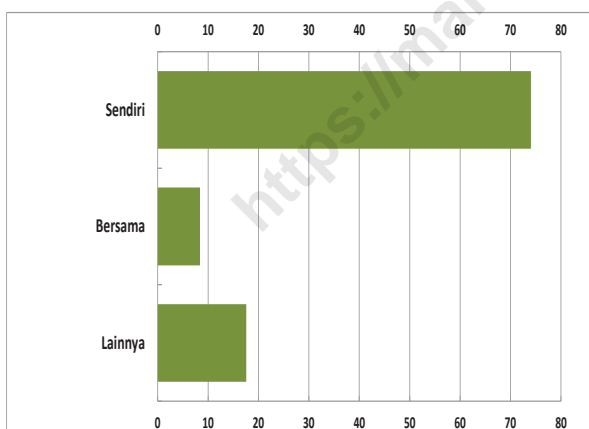
Dilihat dari jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi

GAMBAR 4.6
Banyaknya Tenaga Kesehatan di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 4.6
Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Buang Air
Besar di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

kondisi sanitasi di lingkungan perumahan tempat tinggal mereka. Berdasarkan data yang dihimpun BPS pada tahun 2022, tercatat bahwa masih ada sebesar 17,56 persen penduduk yang belum memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri maupun bersama. Hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara karena sangat pentingnya sarana ini untuk menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kualitas kesehatan penduduk.

orang. Jumlah tenaga kesehatan ini masih perlu penambahan khususnya dokter dan bidan, karena akan melayani penduduk di 118 kecamatan dan 1.199 desa/kelurahan dengan geografis kepulauan.

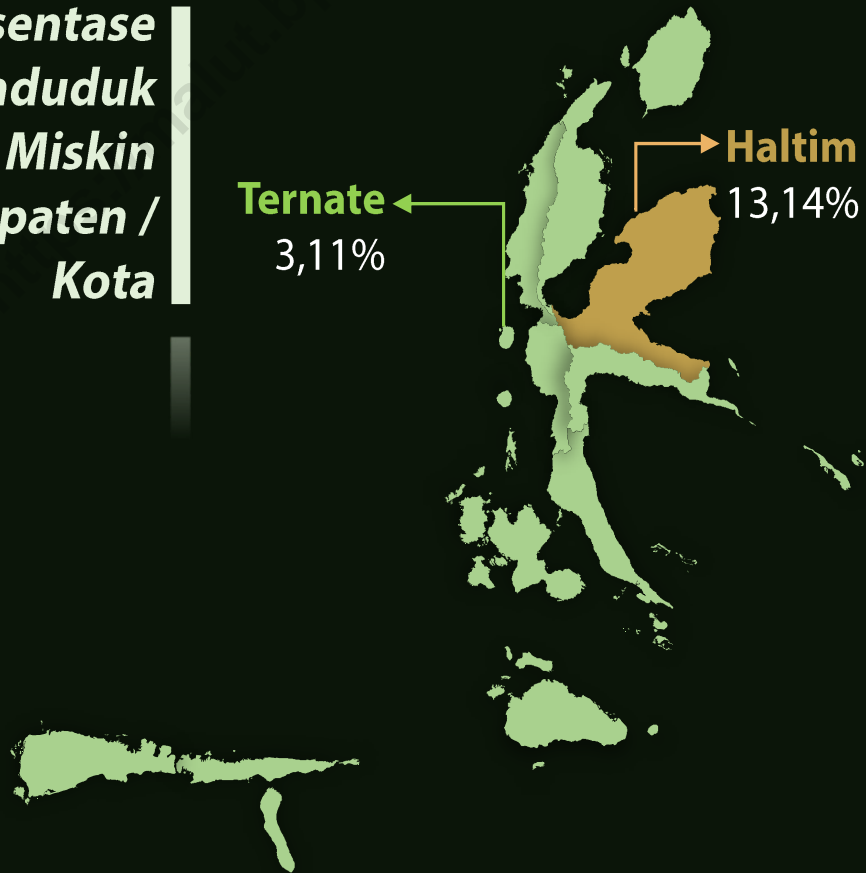
Melihat pada kedua data yaitu fasilitas dan tenaga kesehatan di Provinsi Maluku Utara ini, maka strategi yang dapat diambil adalah dengan menambah jumlah tenaga kesehatan (khususnya dokter dan bidan) serta menjamin pemerataan penempatan tenaga kesehatan dan alat kesehatan modern di Provinsi Maluku Utara. Dengan meningkatkan jumlah bidan maka persentase penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan akan meningkat sehingga akan menurunkan angka kematian bayi. Secara garis besar, strategi ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih mudah dijangkau oleh penduduk Provinsi Maluku Utara.

Kondisi kesehatan penduduk Provinsi Maluku Utara berhubungan erat dengan

Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Maluku Utara Maret 2022

● Indonesia 9,54% ● Maluku Utara 6,23%

Persentase
Penduduk
Miskin
Kabupaten /
Kota



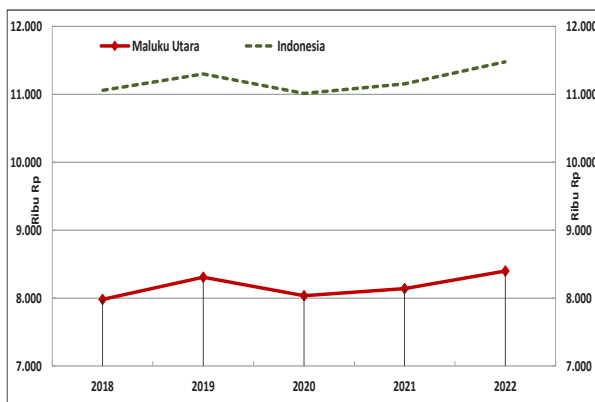
"Economic growth without investment in human development is unsustainable - and unethical."
-Amartya Sen-

Pembangunan manusia adalah proses untuk memperluas pilihan. Salah satu pilihan tersebut adalah untuk dapat hidup dengan layak dan hidup yang sesuai dengan pilihannya. Dalam bidang pekerjaan misalnya, seseorang ingin mempunyai kemampuan untuk memilih bekerja di lingkungan pemerintahan atau swasta; untuk tempat tinggal bisa memilih di dalam kota yang lebih dekat dengan kantor atau di pinggir kota yang lebih nyaman; untuk transportasi mampu memilih dengan mobil sendiri, atau angkutan umum, dan pilihan berbagai segi kehidupan lainnya. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa hakekat dari kesejahteraan manusia itu terletak pada kemampuan juga kebebasan dalam memilih.

Dalam paradigma pembangunan ini, pendapatan adalah alat untuk menguasai sumber daya agar dapat hidup dengan layak. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk mendukung standar hidup yang layak. Sumber daya atau barang dan jasa itu adalah sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan individu dari segi pendidikan, ketrampilan, kesehatan, kemampuan dalam pergaulan di masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam konteks inilah, pendapatan sebagai pendekatan dari tingkat hidup yang layak, dipilih sebagai salah satu indikator pembangunan manusia.

Tetapi seringkali data indikator pendapatan ini sangat sulit didapatkan karena seringkali *under estimate* sehingga diperlukan sebuah indikator lainnya yang dapat mendekati indikator pendapatan ini. Di dalam penghitungan IPM, digunakan

GAMBAR 5.1
Perkembangan Pengeluaran Per kapita Disesuaikan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022



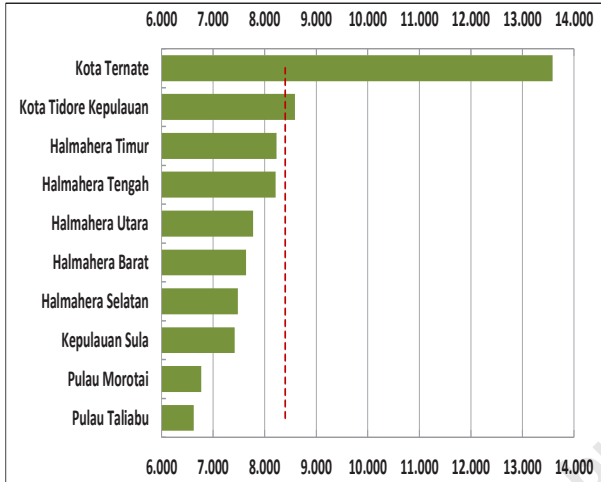
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (*Purchasing Power Parity*) untuk mendekati indikator pendapatan.

Berdasarkan indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Provinsi Maluku Utara terlihat bahwa perkembangan indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2022.

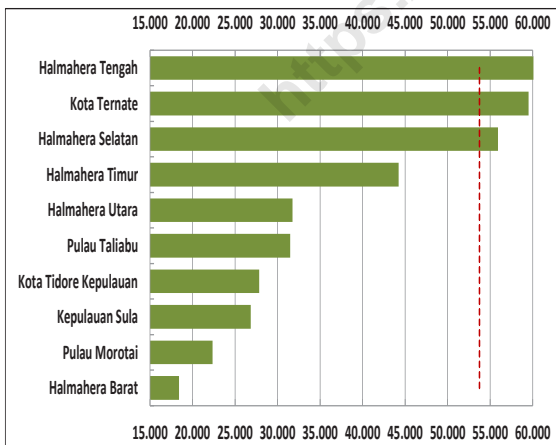
Capaian indikator pengeluaran per kapita disesuaikan Provinsi Maluku Utara pada

GAMBAR 5.2
Pengeluaran Per kapita Disesuaikan di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2022 (ribu rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 5.3
PDRB Per kapita Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 (ribu rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

sedangkan terendah berada di Kabupaten Halmahera Barat sebesar 18,41 juta rupiah.

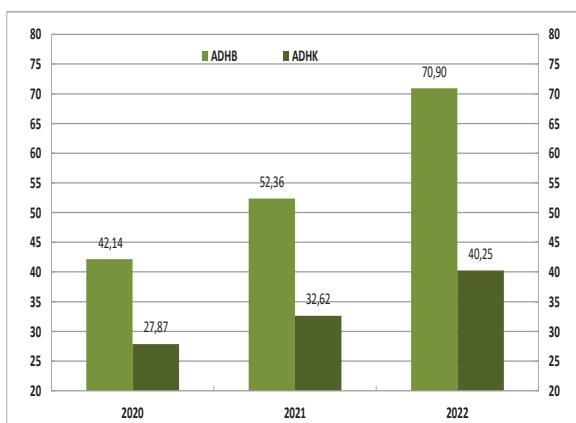
Pembangunan manusia memerlukan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia tidak dapat berlanjut. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat berlanjut tanpa pembangunan manusia. Kebijakan yang proaktif diperlukan untuk memperkuat hubungan timbal balik antara pertumbuhan

tahun 2022 sebesar 8.398 ribu rupiah masih tertinggal cukup jauh dari angka Indonesia yang sebesar 11.479 ribu rupiah.

Selain melihat pada perkembangan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan, perlu juga dilihat bagaimana capaian indikator ini pada tingkat kabupaten/kota di Maluku Utara. Pada tahun 2022, nilai indikator ini tertinggi terdapat di Kota Ternate sebesar 13.586 ribu rupiah dan Tidore Kepulauan yang tercatat sebesar 8.586 ribu rupiah sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 6.623 ribu rupiah dan Pulau Morotai sebesar 6.767 ribu rupiah. Melihat pada data ini maka terlihat bahwa tingkat pendapatan penduduk Kabupaten Pulau Taliabu dan Pulau Morotai perlu perbaikan agar daya beli dan kesejahteraannya meningkat.

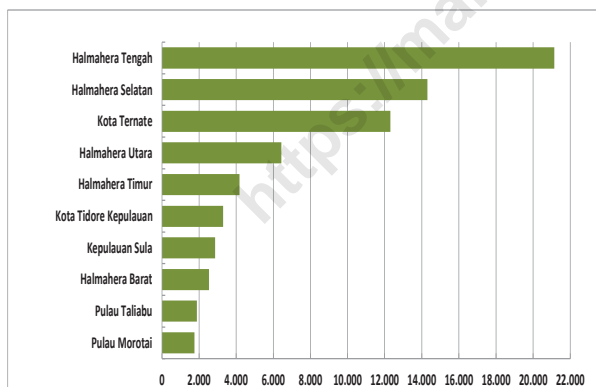
Dilihat dari indikator PDRB per kapita Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 tercatat sebesar 53,74 juta rupiah. Di tingkat kabupaten/kota, tercatat bahwa nilai PDRB Perkapita tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah yang tercatat sebesar 357,68 juta rupiah

GAMBAR 5.4
PDRB Provinsi Maluku Utara
Tahun 2020-2022 (triliun rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 5.5
PDRB Berlaku Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 (milliar rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

ekonomi dengan pembangunan manusia tersebut. Oleh karena itu pada ulasan berikutnya akan dibahas tentang perekonomian Provinsi Maluku Utara dan perbandingan di tingkat kabupaten/kota di Maluku Utara.

5.1 Perekonomian

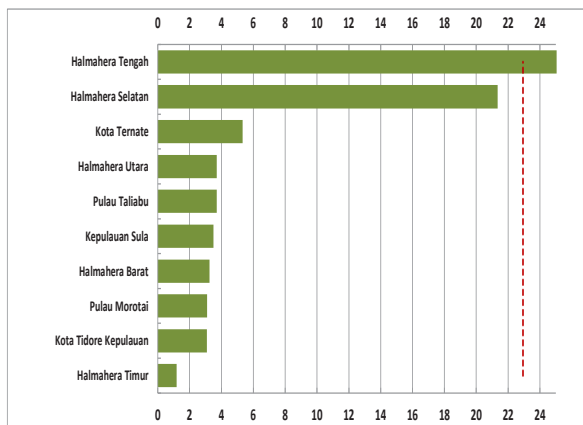
Angka PDRB menunjukkan besarnya nilai produksi bersih yang tercipta dari aktivitas perekonomian di suatu wilayah. PDRB Provinsi Maluku Utara tahun 2022 sebesar 70,90 triliun rupiah, sedangkan bila dihitung berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 40,25 triliun rupiah.

Di tingkat regional Sulampua, PDRB Provinsi Maluku Utara berada di peringkat ke 7 di Sulampua tepat di atas Provinsi Sulawesi Barat. Dari data ini mencerminkan bahwa potensi yang ada belum digali dengan optimal, khususnya potensi perikanan dan pariwisata yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan meningkatkan perekonomian Provinsi Maluku Utara.

Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota, nilai tambah terbesar dihasilkan dari aktivitas ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu mencapai 21,14 triliun rupiah di tahun 2022. Kemudian Halmahera Selatan (14,30 triliun rupiah) serta Ternate (12,31 triliun rupiah). Sedangkan PDRB terkecil di Pulau Morotai (1,89 triliun rupiah) di tahun 2022.

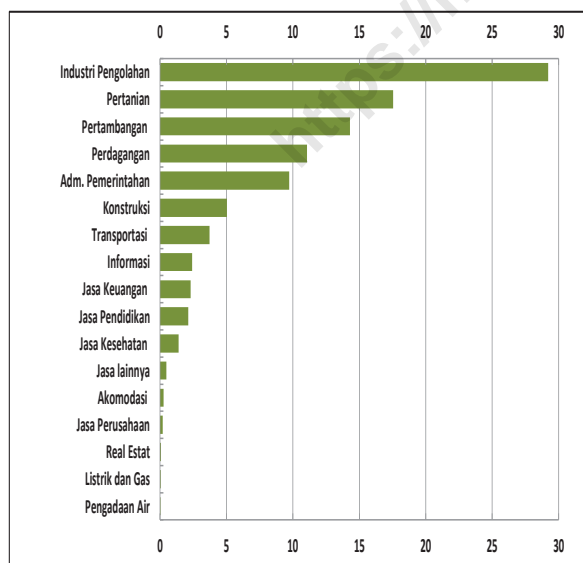
Perekonomian Provinsi Maluku Utara selama periode tahun 2018-2022 mampu tumbuh positif walaupun berfluktuatif. Perekonomian Maluku Utara mengalami perlambatan pada tahun 2016, 2019, dan 2020. Perekonomian Maluku Utara pada

GAMBAR 5.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 5.7
Distribusi Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2021



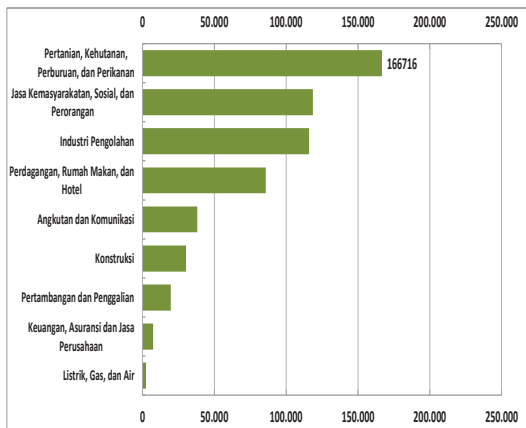
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 22,94 persen.

Hal tersebut disebabkan oleh beroperasinya smelter baru sehingga meningkatkan produksi pada industri logam dasar. Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang positif, hal yang sama juga terjadi pada perekonomian kabupaten/kota mampu tumbuh positif dan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 102,31persen.

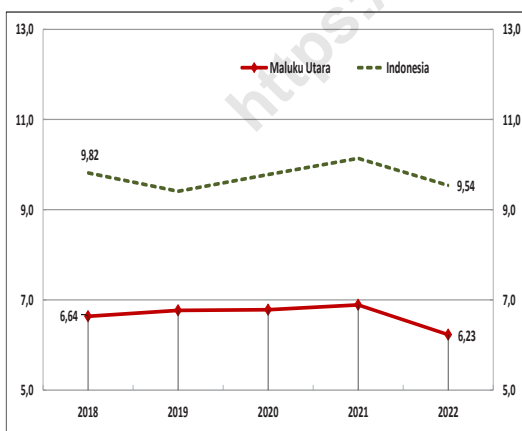
Dilihat dari struktur perekonomian yang ada di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 tampak bahwa kategori Industri Pengolahan mendominasi perekonomian di provinsi ini, yaitu dengan persentase sebesar 29,21 persen, diikuti oleh kategori pertambangan dengan persentase sebesar 17,55 persen, kemudian kategori pertanian dengan persentase sebesar 14,29 persen, serta kategori perdagangan dengan persentase sebesar 11,07 persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya memberikan kontribusi di bawah 10 persen.

GAMBAR 5.8
Penduduk 15+ Bekerja di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 5.9
Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Maluku Utara Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

2019 dan 2021 menjadi 84,60 ribu jiwa dan 87,16 ribu jiwa dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 79,88 ribu jiwa. Bila dibandingkan dengan angka nasional, persentase penduduk miskin di Maluku Utara lebih rendah dibandingkan dengan nasional.

5.2 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi primadona bagi tenaga kerja di wilayah ini. Tercatat sebanyak 166.716 jiwa atau 28,50 persen penduduk menggantungkan pendapatannya di sektor ini.

Keadaan ketenagakerjaan ini hendaknya digunakan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mengambil kebijakan yang berpihak terhadap sektor pertanian akan mengangkat sebagian besar kesejahteraan penduduk di Provinsi Maluku Utara ini.

5.3 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir berhasil diturunkan di tahun 2022 menjadi 6,23 persen. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 79,88 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 menurun sebanyak 7,28 ribu jiwa dari tahun 2021. Selama lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara adalah 81,46 ribu jiwa, kemudian meningkat pada tahun

❖ Peringkat IPM Maluku Utara

7 secara Regional **28** secara Nasional

❖ IPM Menurut Kabupaten/Kota



IPM Tertinggi
Kota Ternate
80,81



UHH Tertinggi
Kota Ternate
71,38 tahun



HLS Tertinggi
Kota Ternate
15,76 tahun



RLS Tertinggi
Kota Ternate
12,06 tahun



Pengeluaran Perkapita Tertinggi
Kota Ternate
13,59 jt rupiah



"All human development, no matter what form it takes, must be outside the rules; otherwise we would never have anything new."

-Charles Kettering-

6.1 Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil uraian dan analisis pada bagian sebelumnya adalah sebagai berikut :

- a. IPM merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia atau status tiga kemampuan dasar penduduk, yakni berumur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpendidikan dan berkecakupan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.
- b. IPM Provinsi Maluku Utara tahun 2022 sebesar 69,47 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang sebesar 68,76 atau meningkat 1,03 persen. Capaian pembangunan manusia di Maluku Utara ini tergolong IPM sedang.
- c. Secara regional IPM Provinsi Maluku Utara berada di urutan ke-7 dari 10 Provinsi di Sulampua serta peringkat ke-28 secara nasional.
- d. Capaian dimensi IPM Provinsi Maluku Utara tertinggi terdapat pada dimensi kesehatan. Sedangkan capaian terendah terdapat pada dimensi pengeluaran (standar hidup layak).
- e. Terdapat disparitas capaian IPM antar Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku utara. Kota Ternate merupakan wilayah di Provinsi Maluku Utara yang memiliki IPM yang sangat tinggi yaitu 80,81; kemudian diikuti oleh Kota Tidore dengan kategori IPM yang tinggi yaitu 71,55. Sedangkan pembangunan manusia di Kabupaten/Kota lainnya tergolong sedang.

6.2 Saran

Sebagai suatu alat ukur yang tunggal dan sederhana, IPM merupakan alat ukur kinerja pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah atau secara lebih spesifik merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah (negara, propinsi, kabupaten/kota).

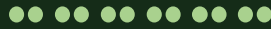
IPM menggambarkan kualitas hidup manusia ditinjau dari tiga aspek yang paling mendasar yaitu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran, maka perlu adanya tindakan lebih lanjut dari para pengambil keputusan baik di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dan

harus menjadi sasaran utama dalam pembangunan manusia.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan manusia maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. Di bidang kesehatan, strategi yang dapat diambil adalah dengan menambah jumlah tenaga kesehatan (khususnya dokter dan bidan) dan alat kesehatan di Provinsi Maluku Utara serta menjamin distribusi yang merata berdasarkan analisis kebutuhan di tiap wilayah. Apalagi dengan kondisi geografis Maluku Utara yang kepulauan, kebutuhan tenaga kesehatan hingga ke pulau-pulau sangat diperlukan. Secara garis besar, dengan strategi ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih mudah dijangkau oleh penduduk Provinsi Maluku Utara.

Di bidang pendidikan, perlu adanya dorongan agar penduduk melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi serta mengefektifkan program belajar 9 tahun. Di samping itu, pembangunan fasilitas sekolah serta akses menuju fasilitas tersebut hingga ke pelosok perlu ditingkatkan. Serta pemberian beasiswa, kebijakan sekolah gratis dan bantuan siswa kurang mampu merupakan alternatif terbaik dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, salah satu upaya terbaik adalah dengan pembangunan sektor pertanian, karena sektor ini merupakan sektor yang paling banyak menarik tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu melalui modernisasi di sektor pertanian agar kinerja di sektor pertanian lebih efektif dan efisien. Serta dibangun industri yang berbasis hasil pertanian sehingga mampu meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian.



- Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022 (Tahun)
- Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022 (Tahun)
- Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022(Tahun)
- Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022 (Tahun)
- Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022 (Tahun)



Tabel Lampiran 1
Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022 (Tahun)

Provinsi/Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MALUKU UTARA	67,80	68,18	68,33	68,45	68,79
Halmahera Barat	65,78	66,13	66,25	66,34	66,64
Halmahera Tengah	63,16	63,65	63,91	64,15	64,61
Kepulauan Sula	62,83	63,18	63,30	63,39	63,68
Halmahera Selatan	65,42	65,75	65,86	65,93	66,22
Halmahera Utara	69,15	69,47	69,56	69,61	69,88
Halmahera Timur	68,19	68,64	68,88	69,08	69,50
Pulau Morotai	66,58	66,99	67,18	67,35	67,74
Pulau Taliabu	61,58	61,95	62,10	62,22	62,53
Kota Ternate	70,50	70,85	70,97	71,06	71,38
Kota Tidore Kepulauan	68,87	69,22	69,34	69,43	69,75

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Tabel Lampiran 2
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022 (Persen)

Provinsi/Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MALUKU UTARA	13,62	13,63	13,67	13,68	13,73
Halmahera Barat	13,07	13,08	13,19	13,20	13,23
Halmahera Tengah	12,93	12,94	12,99	13,11	13,22
Kepulauan Sula	12,66	12,73	12,74	12,77	12,96
Halmahera Selatan	12,76	12,77	12,78	12,79	12,97
Halmahera Utara	13,58	13,59	13,60	13,61	13,67
Halmahera Timur	12,73	12,74	12,75	12,76	12,86
Pulau Morotai	12,41	12,43	12,77	12,93	12,97
Pulau Taliabu	12,14	12,58	12,59	12,65	12,86
Kota Ternate	15,72	15,73	15,74	15,75	15,76
Kota Tidore Kepulauan	13,91	14,20	14,31	14,32	14,36

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Tabel Lampiran 3
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 – 2022 (Tahun)

Provinsi/Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MALUKU UTARA	8,72	9,00	9,04	9,09	9,24
Halmahera Barat	7,88	8,12	8,35	8,37	8,57
Halmahera Tengah	8,65	8,79	9,00	9,01	9,02
Kepulauan Sula	8,57	8,73	8,95	9,00	9,02
Halmahera Selatan	7,62	7,92	7,93	8,10	8,16
Halmahera Utara	8,37	8,38	8,51	8,62	8,63
Halmahera Timur	7,97	8,06	8,26	8,27	8,52
Pulau Morotai	6,96	7,10	7,39	7,40	7,42
Pulau Taliabu	7,44	7,46	7,66	7,67	7,94
Kota Ternate	11,26	11,58	11,71	11,81	12,06
Kota Tidore Kepulauan	9,63	9,64	9,73	9,95	9,96

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Tabel Lampiran 4
Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2018 – 2022 (Ribu Rupiah)

Provinsi/Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MALUKU UTARA	7 980	8 308	8 032	8 140	8 398
Halmahera Barat	7 418	7 660	7 352	7 467	7 636
Halmahera Tengah	7 885	8 258	7 841	7 966	8 212
Kepulauan Sula	7 044	7 221	6 950	7 040	7 417
Halmahera Selatan	7 156	7 298	7 068	7 142	7 479
Halmahera Utara	7 519	7 713	7 414	7 519	7 774
Halmahera Timur	7 969	8 127	7 876	7 973	8 230
Pulau Morotai	6 294	6 655	6 290	6 378	6 767
Pulau Taliabu	6 455	6 659	6 390	6 467	6 623
Kota Ternate	13 166	13 632	13 091	13 290	13 586
Kota Tidore Kepulauan	8 232	8 608	8 188	8 316	8 586

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Tabel Lampiran 5
Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2018 – 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MALUKU UTARA	67,76	68,70	68,49	68,76	69,47
Halmahera Barat	64,54	65,34	65,31	65,56	66,20
Halmahera Tengah	64,66	65,55	65,42	65,82	66,49
Kepulauan Sula	62,96	63,64	63,53	63,80	64,70
Halmahera Selatan	63,39	64,11	63,84	64,19	65,06
Halmahera Utara	67,30	67,75	67,50	67,82	68,38
Halmahera Timur	66,20	66,74	66,75	67,00	67,93
Pulau Morotai	61,39	62,38	62,50	62,90	63,80
Pulau Taliabu	59,67	60,62	60,48	60,73	61,64
Kota Ternate	79,13	80,03	79,82	80,14	80,81
Kota Tidore Kepulauan	69,89	70,83	70,53	70,99	71,55

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan. Stadion. No. 65. Ternate,
Telp. (0921) 3127878, Fax. (0921) 3126301.
E-mail: bps8200@bps.go.id | Website: <http://malut.bps.go.id>

